



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

RAPAT KOMISI IX DPR RI

(Kementerian Kesehatan RI, Kementerian Ketenagakerjaan RI, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan))

Tahun Sidang : 2018-2019
Masa Persidangan : IV
Rapat ke : 2
Jenis Rapat : Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat dan Rapat Dengar Pendapat Umum
Dengan : 1. Menteri Kesehatan RI;
2. Dirut BPJS Kesehatan;
3. Ketua Komite Penilaian Teknologi Kesehatan;
4. Ketua Komite Nas. Fornas;
5. Ketua CISC;
6. Ketua MCCC;
7. Ketua IKABDI;
8. Ketua IDI;
9. Ketua PDIB;
10. Ketua PERHOMPEDIN;
11. Ketua ISPOR;
12. Ketua Komunitas Autoimmun.
Sifat Rapat : Terbuka
Hari/tanggal : Senin, 11 Maret 2019
Pukul : 13.00 WIB – selesai
Acara : Kebijakan Pengendalian Penyakit Katastropik, termasuk Kanker Dalam Sistem JKN.
Ketua Rapat : Dede Yusuf M.E, ST, M.I.Pol/Ketua Komisi IX DPR RI RI.
Sekretaris Rapat : Yanto Supriyanto/Kepala Bagian Sekretariat Komisi IX DPR RI
Tempat : Ruang Rapat Komisi IX DPR-RI
Lantai I Gedung Nusantara I
Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat
Hadir : A. 28 orang dari 51 orang Anggota Komisi IX DPR RI;
B. Menteri Kesehatan RI, Nila F. Moeloek beserta jajaran;
C. Dirut BPJS Kesehatan, Prof. Dr. dr. Fahmi Idris, M.Kes beserta jajaran.

- D. Ketua Komite Penilaian Teknologi Kesehatan, Prof.DR.Sudigdo Sastroasmoro, SpA (K) beserta jajaran;
- E. Ketua Komite Nasional Fornas, Prof.Dr.Iwan Dwi Prahasto beserta jajaran;
- F. Ketua CISC, Aryanthi Baramuli Putri, SH, MH beserta jajaran;
- G. Ketua MCCC, Dr. Nurlina Subair, MSi beserta jajaran;
- H. Ketua IKABDI, dr. A.Hamid Rochanan, Sp.B-KBD,M.Kes beserta jajaran;
- I. Ketua Wantim IDI, Prof.DR.Zubairi Djoeban, Sp.PD, KHOM beserta jajaran;
- J. Ketua PDIB, dr. James Allan Rarung beserta jajaran;
- K. Ketua PERHOMPEDIN, dr. Ronald Alexander Hukom, MHSc, Sp.PD-KHOM beserta jajaran;
- L. Ketua ISPOR, Ahmad Fuad Afdhal, Ph.D beserta jajaran.
- M. Ketua Komunitas Autoimun, dr. Andini S. Natasari beserta jajaran.

I. PENDAHULUAN

Rapat Kerja Komisi IX DPR RI dengan Menteri Kesehatan RI dan Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR RI dengan Direktur Utama BPJS Kesehatan serta Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Ketua Komite Penilaian Teknologi Kesehatan, Ketua Komite Nas. FORNAS, Ketua CISC, Ketua MCCC, Ketua IKABDI, Ketua IDI, Ketua PDIB, Ketua PERHOMPEDIN, Ketua ISPOR dan Ketua Komunitas Autoimun, dibuka pukul 13.50 WIB, maka sesuai dengan Ketentuan Pasal 251 ayat (1) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib, rapat telah memenuhi kuorum dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN

1. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI untuk:
 - a. **menunda pelaksanaan** Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.01.07/Menkes/707/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/659/2017 tentang Formularium Nasional khususnya terkait penjaminan obat bevasizumab dan setuksimab pada pasien kanker kolorektal metastasis dalam program JKN, dengan **melakukan evaluasi** pemberian obat terapi target bevasizumab dan setuksimab dalam program JKN berdasarkan data dan informasi ilmiah terkini yang diberikan oleh seluruh pemangku kepentingan termasuk IKABDI dan PERHOMPEDIN. Hasil evaluasi tersebut digunakan untuk **merevisi** Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.01.07/Menkes/707/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/659/2017 tentang Formularium

Nasional. Selama penundaan tersebut pasien yang membutuhkan obat bevasizumab dan setuksimab **tetap mendapatkan layanan** sesuai dengan diagnosa yang ditegakkan secara definitif.

- b. mensosialisasikan restriksi insulin yang terdapat dalam Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.01.07/Menkes/707/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/659/2017 tentang Formularium Nasional adalah ditujukan bagi pasien DM-2 kepada masyarakat, fasilitas kesehatan, dan apotek.
2. Komisi IX DPR RI mendesak Pemerintah untuk:
 - a. mengkaji skema khusus penanganan penyakit yang berbiaya tinggi (katakstropik) termasuk solusi pembiayaan penyakit katastropik di dalam Program JKN;
 - b. mengkaji pengurangan pajak obat dan alat kesehatan yang digunakan di dalam program JKN.
 3. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI mempercepat penyelesaian Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran (PNPK) untuk menentukan kebijakan selanjutnya terutama untuk penyakit katastropik.
 4. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI untuk meningkatkan upaya promotif dan preventif termasuk melakukan skrining dan deteksi dini untuk menurunkan prevalensi penyakit katastropik.
 5. Komisi IX DPR RI akan melakukan Raker, RDP dan RDPU kembali terkait isu pembiayaan penyakit katastropik pada Masa Persidangan V Tahun Sidang 2018-2019.
 6. Komisi IX DPR RI meminta Kementerian Kesehatan RI, Dirut BPJS Kesehatan dan undangan lainnya untuk memberikan jawaban tertulis atas pertanyaan Anggota DPR RI pada Raker, RDP dan RDPU hari ini, paling lambat tanggal 18 Maret 2019.

III. PENUTUP

Rapat diakhiri pukul 19.30 WIB.

Ketua Rapat/
Ketua Komisi IX DPR RI,



DEDE YUSUF M.E, ST, M.I.Pol

A-415